BAGIAN XVIII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENDAHULUAN

1. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan Bank. Catatan atas laporan keuangan memuat penjelasan mengenai gambaran umum Bank, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan, dan informasi penting lainnya.
2. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan harus berkaitan dengan informasi yang ada dalam catatan atas laporan keuangan.
3. Pedoman ini mengatur hal-hal yang harus diungkapkan namun tidak terbatas pada unsur-unsur yang diuraikan dalam bagian ini.
4. Secara umum, catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:
 - a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting;
 - b. Informasi yang diwajibkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, misalnya subklasifikasi pos-pos tertentu;
 - c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar;
 - d. Untuk pos-pos yang nilainya material, harus dirinci dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Sedangkan untuk pos-pos yang bersifat khusus harus dirinci dan dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan tanpa mempertimbangkan materialitasnya;

e. Untuk ...

- e. Untuk pos yang merupakan hasil penggabungan beberapa pos sejenis dirinci dan dijelaskan sifat dari unsur utamanya dalam catatan atas laporan keuangan.
5. Catatan atas laporan keuangan yang terkait dengan pembiayaan, simpanan, pendapatan, dan beban harus menunjukkan secara terpisah jumlah dari setiap jenis transaksi dan saldo dengan direksi, pegawai, komisaris, pemegang saham, dan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Bank.
6. Dalam rangka membantu pengguna laporan keuangan memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan Bank lain, catatan atas laporan keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut:
 - a. pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan.
 - b. informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan.
 - c. pengungkapan lain termasuk kontinjensi, komitmen, dan pengungkapan keuangan lain serta pengungkapan yang bersifat non-keuangan.

B. DASAR PENGATURAN

1. SAK ETAP.
2. PSAK No.101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

C. PENJELASAN

1. SAK ETAP dimaksudkan agar laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja, arus kas dan kegiatan keuangan yang dilakukan oleh Bank sehingga tujuan laporan keuangan tersebut dapat tercapai. SAK ETAP mungkin tidak mengatur pengungkapan informasi tertentu padahal pengungkapan informasi tersebut diperlukan guna menyajikan laporan keuangan secara wajar. Dalam hal tersebut maka Bank harus memberikan tambahan pengungkapan informasi yang relevan sehingga laporan keuangan dapat disajikan secara wajar.
2. Pada beberapa kasus, informasi naratif yang disajikan pada laporan keuangan periode sebelumnya masih relevan untuk diungkapkan pada periode berjalan. Misalnya, rincian tentang sengketa hukum yang

dihadapi ...

dihadapi, yang hasil akhirnya belum diketahui secara pasti pada periode sebelumnya dan masih dalam proses penyelesaian, perlu diungkapkan kembali pada periode berjalan. Pengguna laporan akan memperoleh manfaat dari informasi adanya ketidakpastian pada tanggal neraca sebelumnya dan langkah-langkah yang telah dilakukan pada periode berjalan untuk mengatasi ketidakpastian tersebut.

3. Terdapat suatu keadaan ketika reklasifikasi guna menjaga daya banding informasi komparatif dengan informasi pada periode berjalan tidak praktis dilakukan, misalnya pada periode sebelumnya data dikumpulkan sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan dilakukan reklasifikasi serta tidak praktis untuk menciptakan kembali informasi tersebut. Dalam keadaan demikian maka sifat penyesuaian terhadap informasi komparatif yang seharusnya dilakukan harus diungkapkan.
4. Dalam keadaan sangat luar biasa, Bank mungkin terpaksa atau memutuskan untuk mengubah tanggal neracanya. Dalam kasus seperti ini, pengguna laporan keuangan perlu mengetahui bahwa jumlah yang disajikan pada periode berjalan dan jumlah komparatif tidak dapat dibandingkan dan alasan perubahan tanggal neraca diungkapkan.
5. Rincian yang tercakup dalam subklasifikasi, di neraca atau di catatan atas laporan keuangan, bergantung pada persyaratan dari SAK ETAP dan materialitas jumlah pos yang bersangkutan. Pertimbangan apakah pos-pos tambahan disajikan secara terpisah didasarkan atas penilaian dari:
 - a. sifat, likuiditas dan materialitas aset;
 - b. fungsi pos-pos tersebut;
 - c. jumlah, sifat dan jangka waktu kewajiban.
6. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, serta informasi tambahan seperti kewajiban komitmen. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan informasi lainnya yang perlu untuk diungkapkan dalam SAK serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

7. Dalam ...

7. Dalam rangka membantu pengguna laporan memahami laporan keuangan dan membandingkannya dengan laporan keuangan Bank lain, catatan atas laporan keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut:
 - a. pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
 - b. informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan;
 - c. pengungkapan lain termasuk komitmen dan pengungkapan keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat non keuangan.

Sistematika struktur dalam catatan atas laporan keuangan agar tetap dipertahankan sepanjang hal tersebut praktis untuk dilaksanakan.

8. Pengguna laporan perlu mengetahui dasar pengukuran yang digunakan (nilai historis, nilai pasar, nilai realisasi, nilai wajar, atau nilai sekarang) sebagai dasar dalam penyiapan laporan keuangan. Apabila lebih dari satu dasar pengukuran digunakan dalam laporan keuangan, maka informasi yang disajikan cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan dasar pengukuran tersebut. Selanjutnya, dalam menentukan apakah kebijakan akuntansi tertentu harus diungkapkan, manajemen mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut akan membantu pengguna laporan untuk memahami bagaimana transaksi dan peristiwa tercermin di laporan laba rugi dan neraca. Kebijakan akuntansi meliputi namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. pengakuan pendapatan dari penyaluran pembiayaan dan distribusi bagi hasil;
 - b. pengakuan agunan yang diambil alih;
 - c. pengakuan beban termasuk metode penyusutan atau amortisasi aset berwujud dan aset tidak berwujud;
 - d. sewa;
 - e. pajak;
 - f. penyisihan;
 - g. imbalan kerja;
 - h. definisi kas dan setara kas.

D. UNSUR-UNSUR

1. Gambaran Umum Bank

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

- a. pendirian;
- b. riwayat ringkas;
- c. nomor dan tanggal akta pendirian serta perubahan terakhir, pengesahan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau nomor dan tanggal Berita Negara yang bersangkutan;
- d. bidang usaha utama sesuai anggaran dasar dan kegiatan utama pada periode pelaporan;
- e. tempat kedudukan dan lokasi utama kegiatan usaha;
- f. tanggal mulai beroperasi, apabila Bank melakukan ekspansi atau pengurangan usaha secara signifikan pada periode laporan yang disajikan, harus disebutkan saat dimulainya ekspansi atau pengurangan usaha dan kapasitas usaha;
- g. kepemilikan, berupa nama pemilik, besaran, dan komposisi kepemilikan;
- h. Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan karyawan:
 - 1) Nama anggota direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas syariah.
 - 2) Jumlah karyawan pada akhir periode atau rata-rata jumlah karyawan selama periode yang bersangkutan.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Dalam bagian ini harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. pernyataan bahwa Bank menggunakan SAK ETAP;
- b. dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan, antara lain:
 - 1) dasar pengukuran laporan keuangan yaitu berdasarkan biaya historis, biaya kini, nilai realisasi, nilai sekarang dan nilai wajar;
 - 2) dasar penyusunan laporan keuangan yaitu dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas dan laporan rekonsiliasi bagi hasil;
 - 3) kebijakan akuntansi tertentu.

3. Kebijakan akuntansi meliputi namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

- a. konsep dasar pengukuran;
- b. pembiayaan yang diberikan;

c. penyisihan ...

- c. penyisihan kerugian pembiayaan;
 - d. agunan yang diambil alih;
 - e. kas dan setara kas;
 - f. aset tetap dan inventaris serta penyusutan;
 - g. pengakuan pendapatan penyaluran pembiayaan;
 - h. pengakuan distribusi bagi hasil;
 - i. Pajak penghasilan;
 - j. Imbalan kerja.
4. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Keuangan disusun dengan memperhatikan urutan penyajian neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan serta informasi tambahan sesuai dengan ketentuan pengungkapan pada setiap pos pada bagian yang terkait, ditambah dengan pengungkapan:
- a. Transaksi hubungan istimewa
 - 1) Rincian jumlah masing-masing pos aset, kewajiban, dan syirkah temporer, penghasilan, dan beban kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa beserta persentasenya terhadap total aset, kewajiban, dana syirkah temporer, penghasilan, dan beban.
 - 2) Penjelasan transaksi yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha utama dan jumlah utang/piutang sehubungan dengan transaksi tersebut.
 - 3) Sifat hubungan, jenis, dan unsur transaksi hubungan istimewa.
Kebijakan syarat transaksi serta pernyataan apakah penerapan kebijakan syarat tersebut sama dengan kebijakan syarat untuk transaksi dengan pihak lain yang tidak memiliki hubungan istimewa.
 - 4) Alasan dan dasar dilakukannya pembentukan penyisihan kerugian piutang yang terkait dengan hubungan istimewa.
 - b. Perubahan akuntansi dan koreksi kesalahan
 - 1) Perubahan estimasi akuntansi
 - a) Hakikat dan alasan perubahan estimasi akuntansi.
 - b) Jumlah perubahan estimasi yang mempengaruhi periode berjalan.
 - c) Pengaruh ...

- c) Pengaruh estimasi terhadap periode mendatang.
Apabila penghitungan pengaruh terhadap periode mendatang tidak praktis, kenyataan tersebut harus diungkapkan.
- 2) Perubahan kebijakan akuntansi
 - a) Hakikat, alasan, dan tujuan dilakukannya perubahan.
 - b) Jumlah penyesuaian perubahan kebijakan akuntansi terhadap periode berjalan dan periode sebelumnya yang disajikan kembali.
 - c) Jumlah penyesuaian yang berhubungan dengan masa sebelum periode yang tercakup dalam informasi komparatif.
 - d) Kenyataan bahwa informasi komparatif telah dinyatakan kembali atau kenyataan bahwa untuk menyatakan kembali informasi komparatif dianggap tidak praktis.
- 3) Kesalahan
 - a) Hakikat kesalahan.
 - b) Jumlah koreksi untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya.
 - c) Jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode-periode sebelum periode yang tercakup dalam informasi komparatif.
 - d) Kenyataan bahwa informasi komparatif telah dinyatakan kembali atau kenyataan bahwa informasi komparatif tidak praktis untuk dinyatakan kembali.
- c. Komitmen dan kontinjensi
 - 1. Pengungkapan komitmen
 - a) Kontrak/perjanjian yang memerlukan penggunaan dana di masa yang akan datang, misalnya perjanjian pemberian pembiayaan dan pinjaman:
 - 1) pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian.
 - 2) periode berlakunya komitmen.
 - 3) nilai keseluruhan dan bagian yang telah direalisasi.
 - 4) sanksi-sanksi.
 - b) Uraian mengenai sifat, jenis, jumlah, dan batasan-batasan.
 - 2. Pengungkapan kontinjensi

a) untuk ...

- a) Untuk perkara/sengketa hukum:
 - 1) pihak-pihak yang terkait.
 - 2) jumlah yang diperkarakan.
 - 3) latar belakang, isi dan status perkara dan pendapat hukum.
 - 4) probabilitas risiko dari peristiwa kontinjensi diungkapkan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen risiko.
- b) Untuk peraturan pemerintah yang mengikat, seperti masalah ketenagakerjaan, diungkapkan uraian singkat tentang peraturan dan dampaknya.
- c) Kemungkinan kewajiban pajak tambahan
 - 1) Jenis ketetapan/tagihan pajak, jenis pajak, tahun pajak serta jumlah pokok dan denda/bunganya.
 - 2) Sikap Bank terhadap ketetapan/tagihan pajak, misalnya keberatan, banding dan sebagainya.
- d) Informasi penting lainnya
Informasi penting lainnya antara lain sifat, jenis, jumlah, dan dampak dari peristiwa atau keadaan tertentu yang mempengaruhi kinerja Bank, seperti peristiwa atau keadaan yang mempengaruhi kelangsungan hidupnya.
- e) Peristiwa setelah tanggal neraca
 - 1) Uraian peristiwa, misalnya tanggal terjadinya, sifat peristiwa.
 - 2) Jumlah moneter yang mempengaruhi akun-akun laporan keuangan.
- f) Perkembangan terakhir SAK ETAP dan peraturan lainnya
 - 1) Penjelasan mengenai SAK ETAP dan peraturan baru yang akan diterapkan dan mempengaruhi aktivitas Bank.
 - 2) Estimasi dampak penerapan SAK ETAP dan peraturan baru tersebut.
- g) Reklasifikasi
Harus diungkapkan antara lain mengenai sifat, jumlah, dan alasan reklasifikasi untuk setiap pos dalam tahun buku sebelum tahun buku terakhir yang disajikan dalam rangka laporan keuangan komparatif.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Maret 2015

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum I
Departemen Hukum,

NELSON TAMPUBOLON

Ttd.

Sudarmaji